



**MELAKSANAKAN PERINTAH JABATAN
SEBAGAI ALASAN PENGHAPUSAN PIDANA
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor : 416
Pk/Pid.Sus/2019)**

SKRIPSI

GRASELLA SHAFIYAH PUTRI

1810611056

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 HUKUM
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL :

**MELAKSANAKAN PERINTAH JABATAN
SEBAGAI ALASAN PENGHAPUSAN PIDANA
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor : 416
Pk/Pid.Sus/2019)**



GRASELLA SHAFIYAH PUTRI
1810611056

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim
Penguji
Program Studi S1- Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 28 Maret 2022

Mengetahui
Ketua Program Studi

Menyetujui
Dosen Pembimbing Tugas Akhir



Taupiqqurrahman, S.H., M.Kn

NIP. 198701022019031006

Dr. Supardi, S.H., M.H

NIDN. 8890923420

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh :

Nama : GRASELLA SHAFIYAH PUTRI
NIM : 1810611056
Program Studi : S1 HUKUM
Judul : MELAKSANAKAN PERINTAH JABATAN SEBAGAI
ALASAN PENGHAPUSAN PIDANA DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan
Mahkamah Agung Nomor : 416 Pk/Pid.Sus/2019)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta



Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., MH



Aji Lukman Ibrahim, S.H., M.H



Dr. Supardi, S.H., M.H



Dr. Abdul Halim, M.Ag

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 14 Mei 2022



Taupiqqurahman, S.H., M.Kn

BIODATA PENULIS



Nama : Grasella Shafiyah Putri
Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta, 1 Maret 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Jati Bunder VII No. 5, Tanah
Abang, Jakarta Pusat.
No. Telpn : 087784406236
Email : grasellasp@upnvj.ac.id
Nama Orang Tua
a. Ayah : Izwan El Jaman, S.H., M.H.
b. Ibu : Anak Agung Oka Desna J.

PENDIDIKAN FORMAL

1. SD : SDN Bendungan Hilir 09 (Lulus Th 2012)
2. SMP : SMPN 216 Jakarta (Lulus Th 2015)
3. SMA : SMAN 35 Jakarta (Lulus Th 2018)

PENGALAMAN ORGANISASI

1. *Student Company* SMAN 35 Jakarta

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarisme dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Grasella Shafiyah Putri
NIM : 1810611056
Tanggal : 28 Maret 2022

Jakarta, 28 Maret 2022
Yang Menyatakan,

A red official stamp from the Indonesian Ministry of Education, Culture, Research, and Higher Education (Kemendikbudristek). The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text "KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KULTUR, Riset, dan Tinggi Pendidikan". A handwritten signature in black ink is written over the stamp. The stamp also contains the alphanumeric code "BAAJK930457100".

Grasella Shafiyah Putri

**Pernyataan Persetujuan Publikasi Skripsi Untuk
Kepentingan Akademik**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Grasella Shafiyah Putri

NIM/NPM : 1810611056

Fakultas : Hukum

Program Studi : S1 Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Judul : MELAKSANAKAN PERINTAH JABATAN
SEBAGAI ALASAN PENGHAPUSAN PIDANA
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
KORUPSI (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung
Nomor : 416 Pk/Pid.Sus/2019)

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data Skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (*submit*) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 28 Maret 2022

Yang menyatakan,



Grasella Shafiyah Putri

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih serta Maha Penyayang atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan Skripsi ini yang merupakan sebagai syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum.

Penyusunan Skripsi ini bertujuan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi pada program studi Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, berkat Rahmat dan Karunia-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“MELAKSANAKAN PERINTAH JABATAN SEBAGAI ALASAN PENGHAPUSAN PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor : 416 Pk/Pid.Sus/2019)”**

Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya dan dapat menambah wawasan mengenai Hukum Pidana. Penulis mengucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam atas kemurahan hatinya kepada **Yth. Dr. Supardi, S.H., M.H.** selaku

Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu dalam meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran selama bimbingan untuk memberikan masukan maupun kritik kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga berterima kasih kepada:

1. Dr. Abdul Halim, M.Ag selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
2. Dwi Aryanti Ramadhani, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
3. Khoirur Rizal Lutfi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
4. H. Heru Suyanto, S.H., M.H., C.L.A. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
5. Taupiqqurrahman, S.H., M.KN. selaku Kaprodi Sarjana Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu pengetahuan.
7. Kedua orangtua yang selama ini selalu mendampingi, mendoakan, serta memberikan dukungan luar biasa kepada penulis dalam segala hal

yang penulis lakukan, khususnya selama penyelesaian skripsi ini.

8. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Akhir kata penulis ucapkan banyak terima kasih dan semoga Allah SWT melimpahkan karunianya dalam setiap amal kebaikan kita dan berikan balasan.

Jakarta, Desember 2021



Grasella Shafiyah Putri

Abstrak

Tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan perbuatan tercela yang bertujuan menguntungkan secara finansial diri sendiri, keluarga atau kelompoknya, yang didalamnya melibatkan penyelenggara negara. Berbagai argumentasi dikemukakan oleh Terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi agar hakim menetapkan putusan bebas. Salah satu alasannya Terdakwa melaksanakan perintah jabatan seperti yang tertuang dalam Pasal 51 KUHP. Pada putusan Nomor : 416 Pk/Pid.Sus/2019, Terpidana mendapatkan putusan bebas oleh hakim dan salah satu pertimbangannya adalah Terpidana melaksanakan perintah jabatan. Tidak adanya keseragaman ukuran mengenai melaksanakan perintah jabatan ini menjadi salah satu penyebab gagalnya proses penuntutan terhadap Terdakwa perkara korupsi. Untuk itu permasalahan yang diangkat yaitu Pertama, bagaimana penafsiran dari Perintah Jabatan menurut ketentuan pada Pasal 51 KUHP. Kedua, bagaimana penerapan Pasal 51 KUHP sebagai alasan penghapusan pidana pada kasus korupsi Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 416 Pk/Pid.Sus/2019 tanggal 8 Januari 2020. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu menggunakan data melalui studi kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal, serta melalui studi kasus dalam putusan Nomor : 416 Pk/Pid.Sus/2019. Hasil penelitian menyimpulkan, Pertama, Pasal 51 ayat (1) KUHP merupakan dasar penghapus perbuatan melawan hukumnya suatu perbuatan (alasan pembenar) karena melaksanakan perintah jabatan yang sah, sedangkan Pasal 51 ayat (2) KUHP merupakan dasar penghapus pertanggungjawaban pidana kepada pelaku (alasan pemaaf) dengan itikad baik mengira bahwa perintah itu didasarkan pada perintah yang sah dalam wewenangnya. Kedua, penerapan Pasal 51 KUHP khususnya ayat (2) dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 416 Pk/Pid.Sus/2019 tanggal 8 Januari 2020 karena Terpidana dalam melakukan perbuatannya didasarkan pada perintah berada dalam dimensi kewenangan hukum publik dengan itikad baik melaksanakan perintah atasannya

sehingga pada diri Terpidana terdapat alasan pemaaf, yang berarti sifat melawan hukumnya ada tetapi Terpidana tidak dapat dijatuhi pidana karena terdapat hal-hal yang menjadi alasan penghapus kesalahan

Kata Kunci : Korupsi, Perintah, Jabatan, Alasan Penghapus Pidana

Abstract

The criminal act of corruption is a disgraceful act that aims to financially benefit oneself, family or group, which involves state officials. Various arguments were put forward by the Defendant in the case of a criminal act of corruption in order for the judge to make an acquittal. One of the reasons is that the Defendant carried out the position order as stated in Article 51 of the Criminal Code. In the decision Number: 416 Pk/Pid.Sus/2019, the convict received an acquittal by the judge and one of the considerations was that the convict carried out the position order. The lack of uniformity in the size of carrying out this office order is one of the causes of the failure of the prosecution process against the defendant in the corruption case. For this reason, the issues raised are: First, how is the interpretation of the Position Order according to the provisions of Article 51 of the Criminal Code. Second, how is the application of Article 51 of the Criminal Code as the reason for the abolition of the crime in the corruption case. Judicial Review Decision Number: 416 Pk/Pid.Sus/2019 dated January 8, 2020. The method used in this study is a qualitative method, namely using data through library studies such as legislation, - invitations, books, and journals, as well as through case studies in the decision Number: 416 Pk/Pid.Sus/2019. The results of the study conclude, First, Article 51 paragraph (1) of the Criminal Code is the basis for eliminating an act against the law of an act (justification) for carrying out a legal position order. While Article 51 paragraph (2) of the Criminal Code is the basis for eliminating criminal liability to the perpetrator (forgiving reasons), namely in good faith thinking that the order is based on a valid order within its authority. The application of Article 51 of the Criminal

Code, especially paragraph (2) in the Judicial Review Decision Number 416 Pk/Pid.Sus/2019 dated January 8, 2020 because the convict in carrying out his actions was based on orders that were within the dimension of public legal authority in good faith carrying out orders from his superiors so that the convict himself there is a forgiving reason, which means that it is against the law, but the convict cannot be sentenced to a sentence because there are things that are the reason for eliminating the guilt.

Keywords : Corruption, Orders, Positions, Excuse of Crime Justification

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan Skripsi	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Biodata Penulis	iii
Pernyataan Orisinalitas	iv
Pernyataan Persetujuan Publikasi	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak.....	ix
Daftar Isi	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Literature Review.....	16
B. Tinjauan Teori.....	18
BAB III DESKRIPSI HASIL TEMUAN	46
A. Kronologi Kasus pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Terdakwa Wakil Ketua Panitia Pemeriksaan Tanah A.....	46
B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi Terdakwa Wakil Ketua Panitia Pemeriksaan Tanah A.....	57
BAB IV PEMBAHASAN.....	97

A. Penafsiran dari Perintah Jabatan menurut ketentuan pada Pasal 51 KUHP.....	97
B. Penerapan Pasal 51 KUHP sebagai alasan penghapusan pidana pada kasus korupsi dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 416 Pk/Pid.Sus/2019 tanggal 8 Januari 2020.....	102
BAB 5 PENUTUP.....	122
A. Kesimpulan.....	122
B. Saran.....	123
DAFTAR PUSTAKA.....	124
LAMPIRAN.....	125